

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang yang unik dan menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Sejarah panjang DIY tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka tunggal ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan

Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Gambar 2.1 Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta

2. Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- 2) Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- 3) Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- 4) Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 -

700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter¹⁰.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, dan Kabupaten Kulon progo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Berikut merupakan luas wilayah masing-masing wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km (1,02%);
- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km (15,91%);
- 3) Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km (18,40%);
- 4) Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km (46,63%);
- 5) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km (18,04%)

Gambar 2.2 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: <http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html>

3. Demografis/Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 97,73. Jumlah penduduk ini diproyeksikan akan bertambah menjadi 3,9 juta di tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 (BPS DIY, 2017).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kota Yogyakarta	189.137	199.49	388.627	94,81
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Gunung Kidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73

Sumber: <https://yogyakarta.bps.go.id/>

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.777.256 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 927.956 jiwa atau sebesar 26,40 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah

penduduk sebanyak 684.740 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 11,21% dan 11,18 %.

4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan dan menjadikannya menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kewenangan inilah yang membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pemimpin secara turun menurun dan tidak melalui pemilihan umum seperti provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, kota/kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing.

Adapun visi dan misi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a. Visi

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

b. Misi

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

B. Profil Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi dan Misi

Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi:

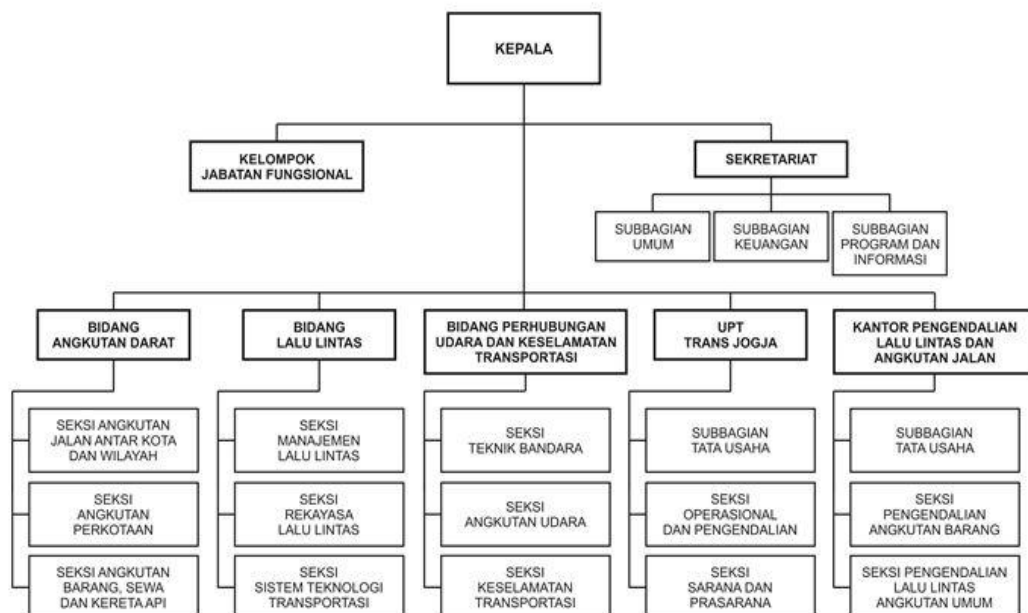
"Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY"

Untuk mewujudkan yang telah tertuang dalam visi diturunkan misi sebagai upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas Perhubungan DIY adalah:

"Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY"

b. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Sumber: <http://dishub.jogjaprovo.go.id/>

c. Tupoksi

Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana yang dimaksud meliputi fungsinya yaitu:

- 1) Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
- 3) Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa, dan angkutan barang;
- 4) Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;
- 5) Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- 6) Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- 7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan
- 8) Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
- 9) Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
- 10) Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;
- 11) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
- 12) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- 13) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Diinas: dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sejarah dan Perkembangan Transportasi *Online*

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat vital dalam keseluruhan aktivitas manusia sehingga semakin berkembang

sarana transportasi tersebut, maka semakin mudah terjalinnya hubungan antar manusia. Transportasi sudah tercipta sejak jaman purba sehingga perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi pada jaman itu. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Hal itu berarti bahwa sarana transportasi sudah ada sejak masa lampau dan dibutuhkan oleh manusia hingga saat ini mobilitas manusia dan barang makin tinggi, dan terjadi bukan hanya di dalam satu wilayah namun juga antar pulau dan bahkan antar Negara hal ini berarti bahwa sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting. Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia.

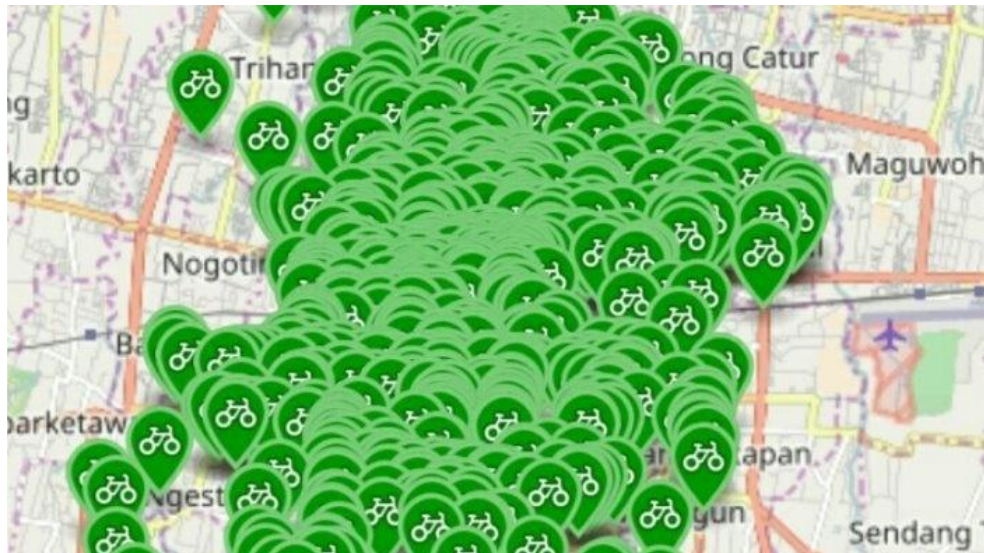
Perkembangan transportasi di setiap negara di dunia tentunya berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing. Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Dengan adanya jaringan internet ini tentunya komunikasi semakin mudah dan cepat.

Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor.

Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis *online* pada kota-kota besar di Indonesia.

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, Grab Bike, Grab Taxi, dan aplikasi berbasis *online* lainnya. Sejak tahun 2015 lalu, layanan transportasi *online* berbasis aplikasi *online* Gojek, grab dan uber setiap tahunnya mengalami peningkatan terus-menerus dalam pengguna layananan maupun yang menjadi driver transportasi *online*. Jumlah pengemudi *online* ini juga bisa dilihat pada aplikasi pemetaan wilayah yang memperlihatkan persebaran para pengemudi tersebut. Persebaran tersebut meliputi daerah hampir semua area di Yogyakarta. Adapun gojek bukanlah satu-satunya pemain dalam bisnis transportasi berbasis *online*

ini di Yogyakarta ini. Ada grab, uber, Calljack, O'Jack. Peta tentang transportasi online yang sangat memadati Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat gambar pemetaan di bawah ini:



Sumber:<http://mutiaan.blogspot.com/2016/04/fenomena-aplikasi-transportasi-berbasis.html>